

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Meckling teori keagenan adalah hubungan antara pemilik (*prencipal*) dan agen sebagai pelaku utama yang berdasarkan kontrak pada suatu perusahaan atau organisasi. Teori agensi ini dapat digunakan untuk memahami isu pengaruh *good corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingan sendiri sehingga dapat menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Namun, dengan adanya konflik kepentingan dan kondisi tidak seimbang, maka informasi yang terjadi antara *principal* dengan *agent* akan menyebabkan biaya keagenan yang ditanggung oleh perusahaan, Hamdani (2018:30).

1.1.2 Teori *Fraud Triangle*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *fraud triangle theory* yang merupakan suatu teori yang menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindakan atau berperilaku untuk melakukan suatu tindakan kecurangan (*fraud*), *fraud triangle* terdiri atas tiga unsur yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

1.1.3 Pengendalian Internal

IFAC (*International Federation Of Accountants*) mendefinisikan pengendalian internal sebagai sistem yang dimiliki organisasi untuk mengelola risiko yang dilaksanakan, dipahami dan diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efesiansi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, mengakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan.

menurut Romeney dan Paul (2012;229) Pengendalian internal (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi. Serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian internal (*Internal Control Structure*) terdiri dari kebijakan dan prosedur yang di buat untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi.

Sedangkan *Commite Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission* (COSO) (2013:3) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut

Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, disegned to provide

reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.

Berbeda dengan teori yang dikemukakan Sunyoto (2014) menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah sebuah sistem dimana sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya. Selain itu, menurut Sunyoto bahwa komponen pengendalian internal dapat dikategorikan menjadi tiga (3) kategori dasar yaitu: 1) *lingkungan pengendalian* yang berkaitan dengan tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur dan pemilik perusahaan terhadap pengendalian, 2) *sistem akuntansi* yang bertujuan untuk mengontrol seluruh transaksi yang dicatat, diproses dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum atas transaksi tersebut, 3) *prosedur pengendalian* yaitu aktivitas pengendalian ini berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan. Ini menunjukkan bahwa pimpinan harus mampu merencanakan, dan mengevaluasi secara konsisten dan kantinyu, sehingga pengendalian berjalan sesuai yang diinginkan. Apabila suatu pengendalian internal tidak dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian yang diinginkan, maka proses pengendalian tidak berarti terhadap pencegahan *fraud* (dikutip oleh Soleman 2013:60).

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengendalian internal harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan organisasi melalui sebuah sistem yang telah didesain sedemikian rupa serta perlu diawasi dengan baik dan benar. Hal ini perlu dilakukan, karena dapat mengurangi tingkat kecurangan diantaranya penyalahgunaan wewenang dan melakukan penyajian laporan keuangan yang Salah.

1.1.3.1 Indikator Pengendalian Internal

Menurut Sudarmanto (2021:9) terdapat lima komponen pengendalian internal yang saling berkaitan pada pernyataan *Commite Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission* (COSO) yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Pengawasan
5. Informasi dan komunikasi.

1.1.4 Good Corporate Governace

Istilah *corporate governance* diperkenalkan pertama kali oleh komite *Cadbury* pada tahun 1992. Komite *Cadbury* mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.

(FCGI,2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai susunan aturan yang menentukan aturan hubungan antara pemegang saham, manajer, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

Organization For Economic Cooperation And Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, pemegang saham, dan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Bank dunia (*world bank*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi dan dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Kusmayadi dikutip oleh sari (2012), bahwa dalam perspektif sektor publik maka secara konseptual pengertian tata kelola pemerintahan (*good corporate governance*) yang baik mengandung dua pemahaman yaitu: 1) nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan 2) nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan social.

Good corporate governance secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena

good corporate governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan professional.

1.1.4.1 Indikator *good corporate governance*

Menurut Sudarmanto (2021:8) terdapat lima Prinsip-prinsip *Good corporate governance* yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance adalah:

1. Transparansi (*Transparency*)

Konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Termasuk dalam konsep ini adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Konsep ini diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi konsep ini mempunyai unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Konsep ini merefleksikan tanggungjawab setiap individu maupun organisasi perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Dengan konsep ini berarti terdapat kesesuaian pengelolaan organisasi/perusahaan dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik.

4. Kemandirian (*Independency*)

Dalam hal ini, organisasi atau perusahaan harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien serta mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai (*values*) yang ada pada organisasi perusahaan untuk dapat dijadikan *unique point* diantara organisasi dan perusahaan lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis tersebut.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan stakeholders lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsi masing-masing.

Berdasarkan penjelasan dari kelima konsep di atas, maka dapat diketahui bahwa konsep ini sangat diperlukan bagi organisasi atau perusahaan dalam menerapkan *good corporate governance* untuk dijadikan sebagai standar

pengukuran kesesuaian dan penyimpangan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.

1.1.5 Fraud (Kecurangan)

The Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE 2020), *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain yang dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi hingga kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain.

Menurut Institute Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Kecurangan (*fraud*) menurut Tunakota (2015,28) dikutip oleh Fahmi, yaitu setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau ancaman kepercayaan. Sedangkan menurut Sinaga (2008) menjelaskan bahwa *fraud* mencakup penggelapan, manipulasi, pelanggaran karena jabatan, pencurian, ketidakjujuran, kelakuan buruk, kelalaian, penggelapan pajak, penyipuan, pemerasan, penyerobotan dan salah saji.

Menurut Suandi dan Riani (2019) dalam Darmanto dkk, kecurangan atau *fraud* dapat didefinisikan sebagai tindakan ilegal apapun yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Pengertian tersebut

menyatakan fraud adalah tindakan melanggar hukum, karena dapat memengaruhi perubahan keputusan yang diambil oleh investor, yang disebabkan oleh penipuan, penyembunyian informasi yang material, serta pelanggaran kepercayaan.

1.1.5.1 Indikator *Fraud* (Kecurangan)

Menurut Sudarmanto (2021:209) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikemukakan oleh Tunggul (2016) faktor itu dikenal dengan istilah fraud triangle, yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)

Adalah motivasi dari individu atau karyawan untuk berindak kecurangan dikarenakan adanya tekanan baik keuangan maupun non keuangan dari pribadi maupun tekanan dari organisasi.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Merupakan faktor sepenuhnya berasal dari luar individu, yakni berasal dari organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan selalu ada setiap kedudukan. Dengan kedudukan yang dimiliki si pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Si pelaku merasa memiliki alasan yang kuat yang menjadi dasar untuk membenarkan apa yang dilakukan serta memengaruhi pihak lain untuk menyetujui apa yang dia lakukan.

1.1.6 Hubungan Antar Variabel

1.1.6.1 Pengaruh pengendalian internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten OKU

Menurut Romeney dan Paul (2012;229) Pengendalian internal (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi. Serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian internal (*Internal Control Structure*) terdiri dari kebijakan dan prosedur yang di buat untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi.

Pengendalian internal dalam sebuah organisasi mempunyai tujuan untuk mencegah secara dini jangan sampai terjadi penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan ataupun pencurian terhadap aset-aset perusahaan dan pegawai dapat menjalankan wewenang tanggung jawab dengan baik. Menurut pendapat yang dikemukakan Arens (2014) menyatakan tujuan pengendalian internal yaitu 1) reabilitas pelaporan keuangan, 2) efisiensi dan efektivitas operasi, 3) ketaatan pada hukum dan peraturan (Sudarmanto 2021:44). Menurut penelitian Berta Berta Elvi Napitupulu dan Pinky Noer Rahmadhita pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

1.1.6.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten OKU

Organization For Economic Cooperation And Development (OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, pemegang saham, dan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Toha (2007) penerapan *good corporate governance* akan memberikan manfaat untuk semakin menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja dalam mengimplementasikan *good corporate governance*. Artinya, penerapan *good corporate governance* akan memberikan manfaat untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan atau organisasi agar ideal menuju keberhasilan usaha atau akuntabilitas usaha (Sudarmanto 2021:30). Menurut penelitian Berta Elvi Napitupulu dan Pinky Noer Rahmadhita *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

1.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel Yang Diteliti, Alat Analisis Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aprilia Firlis Damayanti	Pengaruh pengendalian internal, <i>Good corporate governance</i> dan sistem pengukuran kinerja terhadap pencegahan <i>fraud</i> . jurnal ilmu akuntansi, 3(2) tahun 2021	Variabel: pengendalian internal, <i>Good corporate governance</i> , sistem pengukuran kinerja, pencegahan <i>fraud</i> Alat analisis: regresi linier berganda Hasil penelitian : pengujian secara parsial uji t mendapatkan hasil (1) pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . <i>Good corporate governance</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> Secara simultan uji F Pengendalian internal. <i>Good corporate governance</i> dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Alat analisis regresi linier berganda	Lokasi penelitian

2.	Berta Elvy Napitupulu & Pinky Noer Ramadhita	Pengaruh pengendalian internal dan <i>Good corporate governance</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada perusahaan BUMN sektor jasa keuangan. jurnal akuntansi dan perpajakan, 3(2) tahun 2022	Variabel : pengendalian internal <i>Good corporate governance</i> dan pencegahan <i>fraud</i> Alat analisis: regresi linier berganda Hasil analisis : berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan menunjukkan bahwa pengendalian internal. <i>Good corporate governance</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Alat analisis regresi linier berganda	Lokasi penelitian
3.	Denca Hendryanto Nugroho & Zaenal Afifi	Pengaruh pengendalian internal dan <i>Good corporate governance</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> ,yudistira jurnal,2(3) tahun 2022	Variabel : pengendalian internal, <i>Good corporate governance</i> dan pencegahan <i>fraud</i> Hasil analisis : pengendalian internal <i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Alat analisis regresi linier berganda	Lokasi penelitian
4.	Rusman Soleman	Pengaruh pengendalian internal dan <i>good corporate governance</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> , 17 (1) tahun 2013	Varibel: pengendalian internal, <i>good corporate governance</i> dan <i>fraud</i> Hasil analisis : pengendalian internal dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Analisis regresi linier berganda	Lokasi penelitian
5.	Pratomo Cahyo Kurniawan & Kharina Nur Izati	Pengaruh pengendalian internal dan <i>good corporate governance</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> , 1 (1) tahun 2019	Varibel: pengendalian internal, <i>good corporate governance</i> dan <i>fraud</i> Hasil analisis : pengendalian internal dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap	Analisis regresi linier berganda	Lokasi penelitian

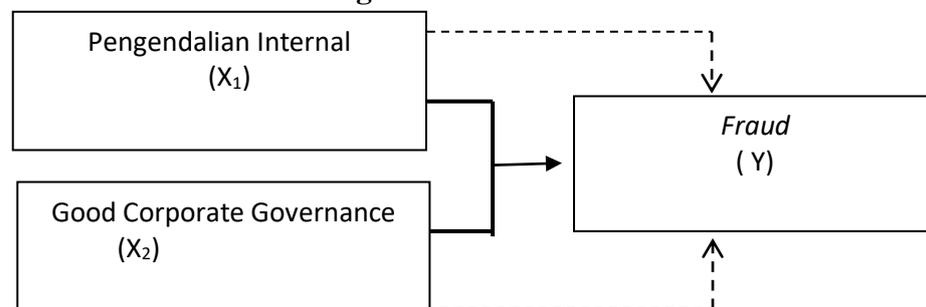
			pengecegan <i>fraud</i>		
6.	Cecilia wirna F Rowa	Pengaruh good corporate governance terhadap pengecegan fraud pada bank BPR di kota kupang, 7 (2) tahun 2019	Varibel: <i>good corporate governance</i> dan <i>fraud</i> Hasil analisis : <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap pengecegan <i>fraud</i>	Analisis regresi linier berganda	Lokasi penelitian
7.	Ridho gilang adiko, widia astute & hafisah	Pengaruh pengendalian internal, etika auditor dan good corporate governance terhadap pengecegan fraud PT INALUM	Variabel: pengendalian internal, etika Auditor <i>Good corporate governance</i> , , pengecegan <i>fraud</i> Alat analisis: regresi linier berganda Hasil penelitian : pengujian secara parsial uji t mendapatkan hasil (1) pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pengecegan <i>fraud</i> . Etika Auditor berpengaruh terhadap pengecegan <i>fraud</i> . <i>Good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap pengecegan <i>fraud</i> . Secara simultan uji F Pengendalian internal. Etika Auditor dan <i>Good corporate governance</i> berpengaruh terhadap pengecegan <i>fraud</i> .	Analisis regresi linier berganda	Lokasi penelitian

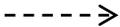
1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Kerangka pemikiran berikut menggambarkan hubungan antara variabel independen, dalam hal ini adalah pengendalian internal, *good corporate governance* dan variabel dependen yaitu *fraud*.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Ket:  **Garis Simultan**
 **Garis Parsial**

1.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009,64) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini diduga bahwa ada pengaruh pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten OKU baik secara parsial maupun simultan.

EMAIL: netyrismawati3@gmail.com